



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : LB.02.03/Menkes/51/2023
Lampiran : Satu berkas
Hal : Dukungan pelaksanaan Survei Kesehatan
Indonesia Tahun 2023

27 Januari 2023

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota

Pada Tahun 2023, Kementerian Kesehatan dalam hal ini Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) akan melaksanakan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang merupakan kegiatan berkala lima tahunan yang telah dimulai sejak tahun 2007 (Riset Kesehatan Dasar – Riskesdas). SKI bertujuan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, mengukur capaian target indikator RPJMN, Renstra, dan SDGs, antara lain status kesehatan, status gizi, kesehatan lingkungan, perilaku kesehatan, dan berbagai aspek pelayanan kesehatan. Data dasar yang dihasilkan akan menggambarkan berbagai indikator kesehatan tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten/kota sebagai dasar penyusunan RPJMN 2025-2029 serta dapat pula digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan kesehatan di daerah.

Survei akan dilaksanakan pada 34 provinsi, 514 kabupaten/kota di Indonesia. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, pengukuran, dan pemeriksaan darah. SKI 2023 menggunakan kerangka sampel Sensus Penduduk 2020 dengan jumlah sampel SKI 2023 sebesar 345.000 rumah tangga (Ruta) dari 34.500 blok sensus (BS) dengan masing-masing 10 Ruta di setiap BS dan penambahan 7-9 ruta balita per BS untuk memenuhi minimal sampel status gizi balita keterwakilan kab/kota.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, bersama ini kami mohon agar Saudara dapat mendukung dan membantu pelaksanaan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, khususnya pada proses pengumpulan data.

Atas kesediaan dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Menteri Kesehatan,



Budi G. Sadikin

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Gubernur seluruh Indonesia
3. Wakil Menteri Kesehatan

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)

Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), yang merupakan transformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes), adalah salah satu unit utama di Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas utama melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan. Adapun menurut Permenkes No. 5 Tahun 2021, fungsi utama BKPK meliputi 1) Penyusunan kebijakan teknis penguatan kebijakan pembangunan kesehatan; 2) Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan; 3) Pelaksanaan integrasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan kesehatan; 4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan kebijakan pembangunan kesehatan; 5) Pelaksanaan administrasi Badan; dan 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Selain itu, BKPK juga memiliki tugas dan fungsi tambahan dari Menteri Kesehatan untuk menyediakan data dan informasi pencapaian hasil pembangunan kesehatan yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, sehingga dapat disusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Kementerian Kesehatan yang lebih terarah dan tepat sasaran. Oleh karenanya, BKPK melanjutkan kegiatan evaluasi pembangunan kesehatan, yang sebelumnya dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dengan melakukan pengumpulan data berbasis komunitas di seluruh Indonesia, dengan tujuan menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu 5 tahun terakhir.

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) merupakan kegiatan pengumpulan data bidang kesehatan berbasis komunitas yang dapat menggambarkan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota, dan sudah dilakukan oleh Badan Litbangkes selama 3 (tiga) kali, yaitu pada tahun 2007, 2013, dan 2018. Pada tahun 2023, BKPK diberi tugas untuk melanjutkan Riskesdas dalam bentuk Survei Kesehatan Indonesia (SKI) diharapkan dapat dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali. Interval waktu pelaksanaan tersebut dianggap tepat untuk menilai perkembangan status kesehatan masyarakat, faktor risiko, dan perkembangan upaya pembangunan kesehatan. Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan kabinet Indonesia Maju dan merupakan tahun pencapaian pelaksanaan SDGs di Indonesia serta pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan mempertimbangkan RPJMN, Renstra, Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM), Program Indonesia Sehat – Pendekatan Keluarga (PIS-PK), dan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas), Pandemi COVID-19, dan Transformasi Sistem Kesehatan.

Teknis pelaksanaan SKI 2023 terintegrasi dengan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) untuk mendukung kebijakan *single survey* di Kementerian Kesehatan. Adapun pelaksanaan SKI 2023 bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam hal metode dan kerangka sampel, dengan proses mengumpulkan data spesifik kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga pengumpul data berlatar belakang pendidikan minimal D3 kesehatan. Desain survei yang digunakan adalah potong lintang dan dilaksanakan di 34 provinsi, 514 Kabupaten/Kota di Indonesia. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, pengukuran, dan pemeriksaan. SKI 2023 menggunakan kerangka sampel Sensus Penduduk 2020. Populasi dan sampel merujuk pada 345.000 rumah tangga (Ruta) dari 34.500 blok sensus (BS) dengan masing-masing 10 Ruta di setiap BS dan penambahan 7-9 ruta balita per BS untuk memenuhi minimal sampel status gizi balita keterwakilan kab/kota. Untuk mengukur faktor risiko beberapa penyakit akan dilakukan pemeriksaan laboratorium (Biomedis) dan pemeriksaan gigi mulut, terhadap sub sampel dengan keterwakilan tingkat Nasional dengan alokasi BS sebesar 2.500 BS. Sekitar 75% pengamatan indikator kesehatan utama pada tahun 2007, 2013, dan 2018 akan diukur kembali pada tahun 2023, dengan penambahan beberapa indikator COVID-19 dan Transformasi Sistem Kesehatan.

Adapun rincian indikator yang diukur pada SKI 2023 meliputi status kesehatan (morbiditas, disabilitas, status gizi), kesehatan lingkungan (*hygiene* dan sanitasi, akses jamban sehat, akses air bersih dan air minum serta rumah sehat), pengetahuan dan perilaku kesehatan (pengetahuan stunting, perilaku pencegahan gigitan nyamuk, perilaku pencarian pengobatan, perilaku hidup bersih sehat, perilaku GERMAS, penggunaan tembakau/rokok, minum alkohol, aktivitas fisik, perilaku konsumsi makanan berisiko), berbagai aspek mengenai pelayanan kesehatan (akses, cakupan, mutu layanan, pengobatan COVID-19, pengobatan ke luar negeri, kepuasan layanan) dan pengukuran serta pemeriksaan yang dilaksanakan seperti berat badan, tinggi/panjang badan, lingkar perut, lingkar lengan atas (LiLA), tekanan darah, kesehatan gigi dan mulut, kadar hemoglobin, glukosa darah puasa dan 2 jam pasca beban (PP), RDT malaria dan pengambilan spesimen darah untuk parameter kimia klinik dan serologi terkait dengan faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular dengan tingkat representatif Nasional. Tahapan dan jadwal kegiatan SKI 2023 sebagai berikut:

1. Persiapan
 - a. Persiapan administrasi dan perijinan
 - b. Penyiapan dan distribusi logistik
 - c. Rekrutmen petugas
 - d. Rapat koordinasi tingkat pusat dan provinsi

2. Pelatihan
 - a. Pelatihan Penanggungjawab Teknis Provinsi (MOT)
 - b. Pelatihan Penanggungjawab Teknis Kab/Kota (TOT)
 - c. Pelatihan enumerator (TC)
3. Updating listing rumah tangga di 34.500 blok sensus untuk dijadikan dasar sampling dan penentuan rumah tangga terpilih
4. Pengumpulan data yang terdiri dari:
 - a. Wawancara dan pengukuran antropometri di 345.000 rumah tangga
 - b. Pemeriksaan gigi dan mulut, pemeriksaan hemoglobin, gula darah dan RDT malaria di 25.000 rumah tangga (subsampel 345.000 rumah tangga)
 - c. pengukuran antropometri balita di tambahan 241.000 rumah tangga balita.
5. *Cleaning* data
6. Analisis dan penyusunan laporan
7. Penyusunan rekomendasi kebijakan

Timeline Pelaksanaan Kegiatan SKI 2023

No	Kegiatan	Waktu								
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep
1	Persiapan									
2	Kick-off SKI 2023 dan Rakornis Pusat									
3	Penyiapan dan distribusi logistik									
4	Rakornis korwil									
5	Rekrutmen PJT Kab/Kota									
6	Pelatihan Penanggungjawab Teknis Provinsi (MOT)									
7	Rakornis Provinsi									
8	Rekrutmen enumerator									
9	Updating Rumah Tangga									
10	Pelatihan Penanggungjawab Teknis Kab/Kota (TOT)									
11	Pelatihan enumerator (TC)									

12	Pengumpulan data								
13	Analisis data								
14	Inputasi dummy table dan konfirmasi hasil								
15	Konsultasi pakar								
16	Penyusunan laporan								
17	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan								
18	Persiapan diseminasi hasil								
19	Diseminasi hasil								

Output Riskesdas 2007, 2013, dan 2018 telah dimanfaatkan oleh pelaksana program Kementerian Kesehatan, termasuk pengembangan rencana kebijakan pembangunan kesehatan jangka menengah (RPJMN 2010-2014, RPJMN 2015-2019, dan RPJMN 2020-2024) oleh Kementerian PPN/Bappenas, dan beberapa Kabupaten/Kota menggunakan data Riskesdas untuk perencanaan, pemantauan, dan mengevaluasi program-program kesehatan dengan berbasis bukti (*evidence-based planning*). Komposit beberapa indikator Riskesdas 2007, 2013, dan 2018 juga telah digunakan menyusun IPKM untuk menghasilkan gambaran peringkat Kabupaten/Kota dalam bidang kesehatan, sehingga dapat melihat disparitas pembangunan kesehatan yang terjadi di Indonesia. Melihat banyaknya informasi yang dapat dihasilkan melalui pelaksanaan SKI 2023 dan dapat dimanfaatkan oleh banyak sektor terkait, maka perlu dipersiapkan dengan baik mulai tahun 2022. Data SKI 2023 diharapkan menghasilkan informasi lengkap terkait bidang kesehatan dan sudah dapat diakses sebelum tahun 2023 berakhir sebagai rancangan teknokratik RPJMN 2024–2029.



Menteri Kesehatan

Budi G. Sadikin